

**THE INFLUENCE OF REGIONAL GOVERNMENT EXPENDITURE,
INFLATION, UNEMPLOYMENT, AND POPULATION ON ECONOMIC
GROWTH IN CENTRAL JAVA PROVINCE**

**PENGARUH BELANJA DAERAH, INFLASI, PENGANGGURAN, DAN
PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA
TENGAH**

I Made Sanjaya^{1*}, Ida Busnetty²

Universitas Trisakti^{1,2}

madesanjaya11@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of regional government spending on economic and health functions, inflation, unemployment, and population dynamics on economic growth in Central Java from 2010 to 2023. The research method used is quantitative with a multiple linear regression model using the Ordinary Least Square (OLS) method. This study uses annual secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The results show that regional government spending on economic functions has a positive and significant effect on economic growth, while government spending on health functions has a negative and significant effect. Meanwhile, inflation and population dynamics do not have a significant effect on economic growth, whereas the unemployment rate has a negative and significant effect on economic growth.

Keywords: Economic Growth, Regional Expenditure, Inflation, Unemployment Rate, Population.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan, inflasi, pengangguran, dan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari tahun 2010 hingga 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan model regresi linier berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, inflasi dan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Inflasi, Tingkat Pengangguran, Penduduk.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2020), pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diwujudkan dalam kenaikan PDB. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi ukuran utama dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan mempertimbangkan

aspek produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kontribusi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting. Namun, kontribusi pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah berbeda-beda karena adanya perbedaan dalam pendapatan dan balas jasa yang

dihasilkan (Febrianti et al., 2021).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Sektor pertanian berkontribusi signifikan dengan komoditas utama seperti padi, tebu, dan tembakau, sementara industri pengolahan terus berkembang di kawasan industri strategis seperti Kendal dan Semarang. Sektor pariwisata juga memiliki peran penting, dengan destinasi terkenal seperti Candi Borobudur, Dieng Plateau, dan Karimunjawa yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, meskipun memiliki potensi tersebut, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Provinsi ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Menurut BPS (2024), pada Juli 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 10,47%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.704.330 jiwa dan garis kemiskinan per kapita bulanan sebesar Rp507.001.

Kemiskinan dan ketimpangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Zhu et al., 2022). Ketimpangan yang tinggi memperburuk kemiskinan dengan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Angka kemiskinan yang tinggi mencerminkan tantangan dalam distribusi pendapatan serta rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang inklusif.

Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat, termasuk optimalisasi belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, belanja pemerintah menjadi instrumen kebijakan yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi belanja pemerintah daerah, khususnya dalam sektor ekonomi dan kesehatan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap keseimbangan sosial-ekonomi suatu daerah. Belanja di fungsi ekonomi, seperti infrastruktur dan industri strategis, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, dan mendorong investasi sektor swasta yang lebih luas. Menurut Todaro dan Smith (2020), berbagai penelitian terbaru menyoroti pentingnya infrastruktur dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Safitri M.I.D (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi ekonomi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Sementara itu, belanja pada sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2020) Sumber daya

manusia, termasuk kesehatan, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan juga merupakan aspek kunci dari pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Arrfah & Syafri (2022) menunjukkan bahwa belanja pada sektor kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Royda & Melvani (2018) menyajikan temuan yang menarik perhatian, yaitu belanja kesehatan justru memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini membuka ruang diskusi mengenai kompleksitas hubungan antara keduanya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi berbagai faktor makroekonomi, tidak hanya belanja pemerintah, tetapi juga inflasi, pengangguran, dan penduduk. Inflasi memiliki dampak ganda bagi perekonomian. Di satu sisi, inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali justru menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok yang semakin mahal. Penelitian yang dilakukan oleh Salim & Fadilla (2021) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian lain oleh Makmur et al. (2023) menemukan bahwa inflasi justru memberikan efek positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran adalah komponen lain yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi selain inflasi. Menurut BPS (2024), tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat ini menunjukkan seberapa kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja. Ini karena ketika ada pembangunan, seseorang menjadi tidak produktif karena tidak memiliki pekerjaan untuk dilakukan (Kristina et al., 2022). Kemudian Febrianti et al. (2021) menyatakan bahwa koefisien pengangguran yang negatif dan signifikan menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan peningkatan pengangguran.

Selain itu, komponen lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dinamika/perubahan penduduk. Selama beberapa dekade terakhir, struktur demografi negara berkembang seperti Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan seperti peningkatan harapan hidup, penurunan tingkat kelahiran, dan pergeseran komposisi usia penduduk adalah beberapa perubahan yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi sebuah negara. Perubahan demografi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun ada tantangan yang muncul, seperti penurunan tingkat kelahiran yang berpotensi mengurangi angkatan kerja potensial di masa mendatang, ada juga peluang, seperti kontribusi yang lebih besar dari populasi usia produktif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kurnia et al., 2024). Kepadatan penduduk yang tinggi dapat berdampak negatif karena meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumber daya yang

langka, seperti lahan pertanian, tetapi kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat dikaitkan dengan peningkatan intensitas kegiatan ekonomi melalui ekonomi aglomerasi (Krugman, 1996).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah pada fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan, inflasi, tingkat pengangguran, dan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Kerangka Teori

1.1.1 Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Setelah berkonsultasi dengan pihak legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memberi tahu masyarakat tentang prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah tiga komponen utama APBD. Komponen belanja daerah menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang untuk layanan publik. Belanja daerah terdiri dari empat pos utama: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Belanja daerah memberikan informasi tentang prioritas belanja pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Belanja Daerah dirinci menurut

Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas Fungsi Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, dan Perlindungan sosial (Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019).

Belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi meliputi belanja pemerintah yang dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UMKM; ketenagakerjaan; pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; bahan bakar dan energi, pertambangan; industri dan konstruksi; transportasi, telekomunikasi dan informatika; pengairan; penelitian dan pengembangan ekonomi; dan ekonomi lainnya.

Belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan meliputi belanja pemerintah untuk obat dan peralatan kesehatan; pelayanan kesehatan perorangan; pelayanan kesehatan masyarakat; keluarga berencana; penelitian dan pengembangan kesehatan; dan kesehatan lainnya

2.1.2. Inflasi

Menurut Sadono Sukirno (2016:14) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari suatu period eke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Inflasi terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkat inflasi

rendah apabila dibawah 2 atau 3 persen, tingkat inflasi moderat apabila mencapai antara 4-10 persen, dan tingkat sangat serius apabila mencapai tingkat beberapa pulu atau beberapa ratus persen.

Inflasi dapat disebabkan oleh tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, serta adanya kenaikan biaya produksi. Disamping itu, inflasi juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan adanya kekacauan politik dan ekonomi (Sadono Sukirno (2016:14-15).

Inflasi dapat berakibat buruk bagi individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu inflasi harus dikendalikan. Salah satu akibat dari inflasi adalah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena upah riil atau kemampuan daya beli mereka berkurang karena naiknya harga barang. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi akan berdampak buruk apabila inflasi tidak dikendalikan (Sadono Sukirno, 2016: 15).

2.1.3. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam Angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Sadono Sukirno, 2016:13).

Faktor utama yang menimbulkan adalah kekurangan

pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang diproduksi. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan diproduksi. Kenaikan produksi akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional dengan penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perekonomian. (Sadono Sukirno, 2016:13).

2.1.4. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Jhingan, 2000). Menurut Lucas, Donald, dan Young (1990), ada tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu: migrasi, mortalitas (kematian), dan fertilitas. Tingkat mortalitas berdampak negatif atau mengurangi laju pertumbuhan penduduk, sedangkan tingkat fertilitas berdampak positif atau meningkatkan jumlah penduduk. Menurut Astawa dan Sarmita (2018), pertumbuhan dan pergerakan manusia ini disebut juga dengan dinamika penduduk. Pertumbuhan dan pergerakan manusia dapat memunculkan berbagai permasalahan yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dinamika penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan penduduk itu sendiri. Dinamika penduduk merupakan situasi yang tak terelakkan di setiap negara. Dinamika

penduduk dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk memerlukan kualitas penduduk yang memadai untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, jika kualitas penduduk rendah dan menghambat pembangunan, itu akan menjadi beban bagi negara (Wardhana et al., 2020).

1.2. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, berhubungan dengan variabel independen, yaitu belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi dan kesehatan, serta variabel lainnya, seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

H1: Belanja pemerintah daerah pada fungsi kesehatan (X1) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

H2: Belanja pemerintah daerah pada fungsi ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

H3: Inflasi (X3) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

H4: Tingkat Pengangguran (X4) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

H5: Penduduk (X5) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup periode 2010–2023 untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Data yang dianalisis meliputi inflasi, tingkat pengangguran, dinamika penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta belanja

pemerintah pada fungsi kesehatan dan ekonomi. Sumber data untuk belanja pemerintah daerah pada kedua fungsi tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, sementara data inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Belanja pemerintah untuk fungsi kesehatan (X1) menunjukkan anggaran pada fungsi kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Belanja pemerintah untuk fungsi ekonomi (X2) menunjukkan anggaran pada fungsi ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
3. Inflasi (X3) merupakan persentase perubahan harga barang dan jasa yang mencerminkan inflasi tahunan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Tingkat pengangguran terbuka/TPT (X4), merupakan persentase dari total angkatan kerja yang tidak bekerja.
5. Penduduk (X5) adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan persentase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh belanja pemerintah daerah pada fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Model regresi ini digambarkan oleh persamaan berikut:

$$PE_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogSehatt} + \beta_2 \text{LogEkot} + \beta_3 \text{LogInft} + \beta_4 \text{LogTptt} + \beta_5 \text{LogPDDKt} + \epsilon_t$$

- PE: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
- SEHAT: Belanja Pemerintah Daerah pada Fungsi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- EKO: Belanja Pemerintah Daerah pada Fungsi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
- INF: Tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah
- TPT: Tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah
- PDDK: Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
- t: Tahun (2010-2023)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi masing-masing variabel independent
- ε : Error term

HASIL PENELITIAN

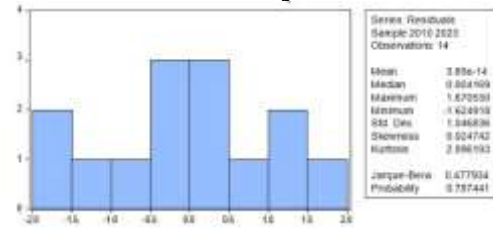
1.3. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum menguji regresi linier berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Jika asumsi klasik terpenuhi, metode OLS dapat menghasilkan estimasi yang optimal dibandingkan metode lainnya. Namun, jika asumsi klasik tidak terpenuhi, estimasi yang dihasilkan cenderung kurang akurat dan tidak reliabel. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data harus dilakukan untuk memastikan apakah data terdistribusi normal (Ghozali, 2017). Hal ini penting karena apabila data tidak berdistribusi normal, maka hasil analisis bisa menjadi bias atau tidak reliabel

Grafik.1 Hasil Uji Normalitas



Grafik 1 menunjukkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai probabilitas sebesar 0,787441 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti data terdistribusi normal.

Residual dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (5%). Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : Residual berdistribusi normal,
- H_1 : Residual tidak berdistribusi normal.

4.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dengan melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat memastikan bahwa variabel independen dalam model tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi sehingga hasil regresi lebih valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Dalam uji multikolinieritas, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, maka terdapat masalah multikolinieritas antar variabel bebas. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : Tidak terjadi multikolinieritas.
- H_1 : Terjadi multikolinieritas.

Tabel 1. Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	17286.85	135904.3	NA
LOG(SEHAT)	1.008402	4.224373	2.846069
LOG(EKO)	1.407318	2.628822	2.586001

LOG(INF)	0.941575	13.60656	1.972127
LOG(TPT)	6.843260	155.0141	1.093175
LOG(PDDK)	154.6805	132541.2	2.934858

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Centered VIF untuk variabel belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi ekonomi, inflasi, pengangguran, dan penduduk tidak melebihi 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak untuk kelima variabel independen yang diteliti.

4.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan nilai Probability Obs*R-Squared. Jika nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan terdapat gejala heteroskedastisitas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: $H_0 =$ Homoskedastisitas dan $H_1 =$ Heteroskedastisitas

Tabel. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.540310	Prob. F(5,8)	0.1159
Obs*R-squared	8.589777	Prob. Chi-Square(5)	0.1266
Scaled explained SS	1.537315	Prob. Chi-Square(5)	0.9087

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, atau H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan nilai Obs*R-Squared sebesar 8,589777 dan nilai probabilitas chi-squared sebesar 0,1266 lebih besar dari 0,05

4.1.4. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi, hipotesis H_0 menyatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi, sedangkan H_1 menyatakan bahwa autokorelasi

terjadi. Jika nilai probabilitas Obs*R-Squared lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis H_1 diterima.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

F-statistic	0.333418	Prob. F(2,6)	0.7289
Obs*R-squared	1.400320	Prob. Chi-Square(2)	0.4965

Sumber: Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,4965 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.

1.4. Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t- Statistik	Prob.
C	166.0961	1.263286	0.12105
SEHAT	-1.881051	-1.873198	0.04895
EKO	3.659744	3.084996	0.0075
INF	0.358674	0.369634	0.3606
TPT	-6.970640	-2.664656	0.0143
PDDK	-14.28548	-1.148622	0.14195
R ²	0.765649		
Adj R ²	0.619180		
F- stat.	5.227378		
Prob (F-stat)	0.019950		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Royda & Melvani (2018) menyatakan bahwa belanja kesehatan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak sejalan dengan penelitian

M.I.D Safitri (2021), Arrfah & Syafri (2022), Astuti & Lestari (2020), dan Trianto & Sihalohe (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja pemerintah provinsi Jawa Tengah pada fungsi kesehatan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada periode penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (M. I. D. Safitri, 2021). Belanja fungsi ekonomi memiliki efek positif dan signifikan dalam jangka panjang karena dampak infrastruktur tidak hanya dirasakan langsung saat dibangun, tetapi juga akan terlihat dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur tersebut pasti membutuhkan banyak tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja akan menghasilkan peningkatan tingkat produktivitas dan penurunan angka kemiskinan, yang pada akhirnya akan membawa pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Torrisi (2009) menjelaskan bahwa infrastruktur adalah penggerak roda ekonomi.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, infrastruktur memainkan peran penting sebagai penggerak roda perekonomian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Mandala (2020), dan Zhu et al. (2022). Barro (1995) juga menyatakan bahwa inflasi hanya menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi ketika mencapai tingkat yang sangat tinggi (hiperinflasi). Inflasi hanya memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan hanya ketika

inflasi tinggi. Oleh karena itu, inflasi pada tingkat rendah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Febrianti et al., 2021), (Yuanda & Haryatiningsih, 2022), dan (Novita Pratiwi, 2022). Pengangguran adalah masalah yang sangat sulit untuk dihindari oleh suatu negara atau daerah. Hal ini dapat memicu masalah sosial seperti kejahatan dan masalah ekonomi. Oleh karena itu, laju ekspansi ekonomi memengaruhi tingkat pengangguran. Pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan menerapkan kebijakan dan inisiatif yang meningkatkan produktivitas dan keterampilan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja (Raysharie & Septianingsih, 2024).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, dan sebaliknya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan E. R. Safitri (2019). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis didorong olehnya. Tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan efisiensi pasar tenaga kerja adalah beberapa faktor tambahan yang mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja pemerintah provinsi Jawa Tengah pada fungsi kesehatan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja pada fungsi ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan pada tingkat moderat. Sebaliknya, pengangguran berdampak negatif dan signifikan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk juga berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan yang menunjukkan bahwa ada komponen lain yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup optimalisasi anggaran dengan fokus pada belanja yang produktif dan efektif terutama di bidang kesehatan. Perbaiki perumusan program-program yang efektif di bidang kesehatan serta alokasi anggaran yang tepat diharapkan dapat mendukung kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Disamping itu, pengembangan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas, seiring dengan upaya untuk mengendalikan inflasi dan

mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis berkonsentrasi pada data kuantitatif yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks di Jawa Tengah. Kedua, periode yang dianalisis mungkin terlalu pendek untuk menggambarkan perubahan ekonomi yang signifikan. Beberapa variabel lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian di dalam negeri dan global, tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya, peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan analisis kualitatif dalam penelitian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrfah, A. P., & Syafri, S. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Info Artha*, 6(2), 159–166. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1890>
- Astuti, D., & Lestari, E. P. (2020). *The Government Spending on Education and Health Care in Indonesia's Economic Growth*. 143(Isbest 2019), 14–18. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.004>
- Astawa, I. B. M., & Sarmita, I. M. (2018). Geografi Penduduk. PT. Raja Grafindo

- Persada. Jakarta Barro, Robert J. (1995). Inflation and Economic Growth. NBER Working Paper Series, No. 5326. National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA.
- Febrianti, I. D., Sugianto, S., & Shinta Aminda, R. (2021). Determination of Economic Growth In Java Island. *International Journal of Social Service and Research*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v1i2.24>
- Ghozali, I. (2017). Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan D.Guritno. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kristina, F., Angeliani, F., Malaifani, S. R. O., Hayati, N., Hidayati, F. N., Rina, L., & Sadjarto, A. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 299–314. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1173>
- Krugman, P. R. (1996). The self-organizing economy. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Lucas, D., Mc Donald, P & Young, C. (1990). Pengantar Kependudukan. Terjemahan.
- Mandala, R. A. M. (2020). Inflation, Government Expenditure, and Economic Growth in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6961>
- Novita Pratiwi. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 155–166. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.300>
- Kurnia, T., Sibarani, J. C., Habeahan, J., Siagian, A. P., & Hidayat, N. (2024). Analisis pengaruh perubahan demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 1- 20. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2404>
- Raysharie, P. I., & Septianingsih, D. (2024). *Niantanasikka, Vol+2+No.1+Januari+2024++Hal+ 98-106*. 2(1).
- Royda, & Melvani, F. N. (2018). Pengaruh belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika-Adminika-Informatika*, 4(1), 1-15.
- Sadono Sukirno. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers
- Safitri, E. R. (2019). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah, Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2013-2017*.
- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. www.bps.go.id,
- Todaro & Smith (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. Pearson
- Torrise, G. (2009). Public Infrastructure: Definition, Classification and Measurement Issues. In *Economics, Management, and Financial Markets* (Vol. 2009, Issue 3). <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/>
- Trianto, D., & Sihalo, E. D. (2023). the Effect of Government Spending on Health on Economic Growth: a Study of 508 Regions in Indonesia. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 15(2), 110–117. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i2.5498>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Noven, S. A. (2020). Dinamika Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, August, 22. <https://doi.org/10.24843/bse.2020.v25.i01.p02>
- Yuanda, D. A., & Haryatiningsih, R. (2022). Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung 2005-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 115–124. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIEB>
- Zhu, Y., Bashir, S., & Marie, M. (2022). Assessing the Relationship between Poverty and Economic Growth: Does Sustainable Development Goal Can be Achieved? *Environmental Science and Pollution Research*, 29(19), 27613–27623. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18240-5>